

Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill

Oktavianus M. Yuda Pramana

jehuddha@yahoo.co.id

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Abstrak

Tulisan ini menelaah dinamika tegangan antara kebebasan dan otoritas dalam kehidupan politik. Menemukan prinsip untuk menganalisis tegangan antara keduanya sehingga kehidupan politik tidak jatuh dalam salah satu kutub atau ekstrem. Dalam *On Liberty* (2003 [1859]), Mill menyatakan perjalanan sejarah manusia dicirikan oleh pertarungan antara kebebasan (liberty) dan otoritas (authority). Dalam pertarungan itu, Mill menaruh perhatian pada kebebasan yang selalu berada dalam tegangan berhadapan dengan otoritas. Mill menyoroti batas yang tepat bagi pelaksanaan otoritas, sebab otoritas yang melampaui batas menjadi ancaman bagi kebebasan. Untuk menganalisis tegangan antara kebebasan dan otoritas, Mill mengajukan prinsip cedera (harm principle). Prinsip ini menegaskan bahwa satu-satunya tujuan pembatasan kebebasan adalah untuk mencegah cedera pada orang lain.

Keywords: Kebebasan, Kebebasan Individu, Otoritas, Otoritas Negara, Prinsip Cedera (Harm Principle)

Pendahuluan

Dinamika kehidupan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini diwarnai fenomena kebebasan orang mengekspresikan diri, pendapat, pandangan, maupun gagasannya terutama dengan sarana media sosial dan sarana lain dalam dunia maya. Namun kebebasan penyaluran ekspresi itu seringkali menjadi berlebihan dalam arti tanpa batas dan tanpa kontrol. Kondisi ini kemudian dapat memicu tersebarnya berita bohong (hoax), kontroversi, polemik, ujaran kebencian dan sebagainya. Di sini kebebasan itu mulai menimbulkan keresahan. Jika demikian, haruskah otoritas membatasi dan mengontrol kebebasan tersebut? Apakah pembatasan dan kontrol otoritas tersebut menjamin kebebasan atau justru menghalangi kebebasan?

Pertanyaan di atas mengerucutkan gejala adanya tegangan antara kebebasan dan otoritas dalam kehidupan masyarakat dan negara. Tegangan yang dinamis antara kebebasan individu dan otoritas negara menimbulkan persoalan tentang prinsip apakah yang dapat menengahi sekaligus membatasi agar kehidupan politik tidak jatuh dalam salah satu

kutub atau ekstrem tertentu. Dari prinsip ini dapat diharapkan terjadinya keseimbangan, di mana di satu sisi kebebasan tidak membatalkan otoritas, dan di sisi lain otoritas tidak membatalkan kebebasan.

Metode Penelitian

Tulisan ini akan mendalami persoalan di atas berdasarkan pemikiran seorang tokoh filsuf modern yakni John Stuart Mill (1806-1873).¹ Penulis akan menelusuri pemikiran Mill tentang kebebasan dan otoritas serta hubungan keduanya melalui studi pustaka atas karya-karyanya, terutama karya Mill yang berjudul *On Liberty* (1859). Dalam *On Liberty*, Mill menulis, "Pertarungan antara Kebebasan dan Otoritas adalah potret paling menonjol dalam potongan sejarah yang paling awal kita kenal".² Mill menyatakan bahwa ia menulis *On Liberty* sebagai kajian tentang "Kebebasan Sipil atau Sosial: hakikat dan batas batas kekuasaan yang secara legitim dapat diterapkan oleh masyarakat terhadap

1 John Stuart Mill ialah seorang filsuf Inggris yang paling berpengaruh pada abad ke-19. Mill memberikan kontribusi penting pada semua bidang utama filsafat, yang mencakup metafisika, epistemologi, etika, filsafat sosial dan politik, filsafat agama, dan filsafat pendidikan. Mill adalah filsuf besar Inggris terakhir yang menyajikan pandangan terintegrasi dari keseluruhan filsafat dan yang menghubungkan dimensi teoretis dan normatif pemikirannya secara langsung. Lebih dari sekedar penulis, Mill adalah seorang tokoh masyarakat. Pekerjaan praktisnya di bidang filsafat dan ekonomi selalu digunakan untuk membicarakan tentang masalah-masalah kebijakan publik yang kontroversial. Mill juga terlibat aktif dengan berbagai urusan pada masa itu, termasuk menjabat sebagai anggota Parlemen. Kehidupan dan pekerjaan Mill ini menjadikannya memiliki reputasi sebagai filsuf sosial dan politik. Bagi Capaldi, Mill layak disebut sebagai filsuf politik Inggris paling penting pada abad ke-19 (Lihat Nicholas Capaldi, *John Stuart Mill: A Biography*, (New York: Cambridge University Press, 2004), ix-x).

2 John Stuart Mill, *On Liberty* (diedit oleh David Bromwich dan George Kateb), (New Haven and London: Yale University Press, 2003 [1859]), 73: "The struggle between Liberty and Authority is the most conspicuous feature in the portions of history with which we are earliest familiar".

individu".³ Dengan kajian pustaka atas karya-karya Mill terutama *On Liberty*, penulis dapat menemukan pandangan dan gagasan Mill atas persoalan hubungan kebebasan dan otoritas serta prinsip penyeimbang bagi keduanya.

Kebebasan dalam Pembahasan Mill

Istilah kebebasan merujuk pada istilah bahasa Inggris *liberty* dan *freedom*. Menurut Herry-Priyono, meskipun berasal dari akar linguistik berbeda, keduanya menunjukkan hal yang sama. Kata *liberty* berakar dari kata *libertas* (Latin), dengan turunan istilah yang mirip dalam kata *liberté* (Prancis), *libertad* (Spanyol), *libertà* (Italia). Sedangkan kata *freedom* berakar dari rumpun bahasa Eropa Utara, seperti kata *Freiheit* (Jerman), *vrijheid* (Belanda), *frihet* (Swedia), *frihed* (Denmark).⁴ Tetapi menurut Joel Feinberg, kedua istilah ini memiliki perbedaan meskipun sering digunakan secara bergantian. Istilah *freedom* ketika diterapkan pada orang dan tindakannya, merujuk pada kemampuan seseorang dalam serangkaian keadaan tertentu untuk bertindak dengan cara tertentu. Sedangkan istilah *liberty* merujuk pada izin otoritatif untuk bertindak dalam beberapa cara tertentu.⁵

Paul Ziff dan Hanna Fenichel Pitkin menjelaskan bahwa dalam bahasa Inggris istilah *freedom* memiliki cakupan penggunaan yang lebih luas daripada *liberty* yang memiliki konotasi lebih formal dan legal. Jadi terdapat akar konsep yang berbeda sesuai dengan konteks penggunaan yang berbeda dan nuansa makna yang berbeda. Mill biasanya menggunakan '*liberty*' dan '*individual liberty*' (kebebasan individu) untuk membahas praktik kebebasan yang lebih terbatas. Dalam istilah *liberty* tersirat struktur kontrol yang berkelanjutan, baik hukum dan peraturan eksternal atau kontrol diri. Ini merupakan bagian dari daya tarik Mill kepada kaum liberal dan menjadi salah satu alasan mengapa Mill menulis esainya '*On Liberty*' dan bukan '*on freedom*'. Sebaliknya, Mill biasanya menggunakan istilah '*freedom*' secara lebih luas untuk mencakup penentuan nasib sendiri individu (*individual self-determination*) dan pemerintahan sendiri kolektif (*collective*

self-government) yang lebih luas.⁶ Sesuai dengan judul karyanya, *On Liberty*, yang menjadi acuan utama tulisan ini, maka kebebasan yang dibahas dalam tulisan ini lebih banyak mendekati istilah *liberty*. Mill menyatakan bahwa karyanya *On Liberty* membahas tentang kebebasan sipil atau sosial (*civil or social liberty*).⁷

Di antara banyak pemikiran tentang kebebasan warga atau kebebasan sipil saat ini, sangat dikenal tipologi paham kebebasan yang diajukan Isaiah Berlin (1909-1997) dalam karyanya *Two Concepts of Liberty* (1958). Menurut Berlin, pemikiran tentang kebebasan dalam sejarah pemikiran politik dapat dibedakan menjadi kebebasan negatif (*negative liberty*) dan kebebasan positif (*positive liberty*). Kebebasan negatif, dalam pandangan Berlin, merupakan jawaban terhadap pertanyaan 'dalam hal apa pelaku – seorang atau kumpulan orang – dibiarkan atau seharusnya dibiarkan bertindak tanpa campur tangan orang lain?' Dengan kata lain konsep kebebasan negatif mencari jawaban atas pertanyaan 'sejauh mana pemerintah mencampuri urusan pribadiku?' Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kebebasan negatif menunjuk pada kondisi tiadanya kekangan, atau kebebasan dari (*freedom from*). Kebebasan dari yang dimaksud adalah kebebasan dari kekangan yang dilakukan orang lain. Fokus paham kebebasan negatif adalah tiadanya kekangan, hambatan atau campur tangan dari luar diri seorang (*external*) untuk melakukan apa yang ia inginkan. Kebebasan negatif terwujud dengan tiadanya kekangan dari luar pelaku. Berlin menyatakan bahwa inilah arti kebebasan yang dipakai para pemikir politik klasik. Paham kebebasan negatif ini tercermin dalam gagasan Thomas Hobbes, Benjamin Constant, Wilhelm von Humboldt, dan John Stuart Mill.⁸

3 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 73: "Civil, or Social Liberty: the nature and limits of the power which can be legitimately exercised by society over the individual".

4 B. Herry Priyono, *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022), 85.

5 Lihat Edward Craig (ed), *The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy*, (London and New York: Routledge, 2005), 294-295.

6 Lihat Bruce Baum, *Rereading Power and Freedom in J.S. Mill*, (Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press Incorporated, 2000), 24. Baum juga merangkum bahwa Mill menggunakan istilah '*freedom*' lebih sering daripada istilah '*liberty*' dalam karya-karya seperti *Representative Government* dan *The Subjection of Women*, di mana ia membuat argumen yang lebih luas tentang kebebasan (*freedom*). Dalam *Representative Government* Mill menggunakan istilah '*freedom*' sebanyak 38 kali dan istilah '*liberty*' sebanyak 27 kali, dan dalam *The Subjection of Women* Mill menggunakan istilah '*freedom*' sebanyak 30 kali dan istilah '*liberty*' hanya 10 kali. Sebaliknya Mill lebih sering menggunakan istilah '*liberty*' dalam karyanya *On Liberty*. Istilah '*liberty*' muncul 85 kali dalam *On Liberty*, tidak termasuk judul dan judul bab, sedangkan istilah '*freedom*' hanya muncul 46 kali. Lihat Bruce Baum, *Rereading* ..., 282-283.

7 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 73.

8 Lihat B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan,...*, 88-89, 92.

Kebebasan positif, dalam pandangan Berlin, merupakan jawaban terhadap pertanyaan ‘apa, atau siapa, sumber kekangan atau intervensi yang bisa menentukan pelaku untuk bertindak, atau menjadi, ini dan bukan itu?’ Dengan kata lain, konsep kebebasan positif mencari jawaban atas pertanyaan ‘siapa memerintah aku?’ Secara ringkas kebebasan positif dapat dikatakan sebagai kebebasan untuk melakukan sesuatu (freedom to). Dalam rumusan Berlin, paham positif kebebasan ini bertumpu pada kehendak pribadi manusia untuk menjadi tuan atas dirinya, yang menghendaki hidup dan keputusan bergantung pada diri sendiri, bukan pada kekuatan di luar diri, apapun bentuknya. Fokus paham kebebasan positif adalah penentuan diri (self-determination) dan otonomi tindakan. Kebebasan positif dipandang terwujud dengan adanya daya penentuan dari dalam diri pelaku (internal). Paham kebebasan positif ini terlihat jelas dalam gagasan Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, GWF Hegel.⁹

Paham kebebasan positif dan negatif dari Berlin ini dapat membantu untuk menilai bagaimana pandangan Mill tentang kebebasan yang dibahasnya dalam *On Liberty*. Mill secara teliti menyatakan bahwa subjek dari *On Liberty* adalah “Kebebasan Sipil atau Sosial,” (Civil or Social Liberty) yang merupakan kebebasan dalam masyarakat, bukan “Kebebasan Kehendak” (Liberty of the Will). Kebebasan dipahami sebagai tidak adanya paksaan, pengekangan atau paksaan, tidak adanya apa yang Mill sering sebut “campur tangan” (interference).¹⁰ Karena itu, Mill menunjukkan perhatiannya terhadap “hakikat dan batas-batas kekuasaan yang secara legitim dapat diterapkan oleh masyarakat terhadap individu”. Kekuasaan ini bisa menjadi tirani tidak hanya di tangan pemerintah tetapi juga melalui kebiasaan dan kesukaan dan ketidak-sukaan individu lain dalam masyarakat.¹¹ Maka karya Mill ini, dalam pandangan Herry-Priyono, merupakan bagian dari tradisi panjang kecemasan para pemikir politik akan ancaman tirani. Tirani dimaksud tidak hanya dilakukan kekuasaan negara tapi juga oleh warga lain. Titik tolak pembahasan Mill adalah kebebasan warga atau sipil (civil liberty) dalam hubungannya dengan otoritas negara dan kebebasan warga lain. Kebebasan yang dibahas Mill ini dapat dipahami dalam idiom kebebasan negatif menurut pengertian Berlin, yakni bahwa “kebebasan diartikan sebagai terlindunginya warga dari tirani para penguasa politik”.¹² Di sini tampak

pandangan dasar Mill tentang kebebasan warga sebagai individu dan bahwa kebebasan itu langsung berhadapan dengan otoritas di luar diri warga atau individu tersebut.

Otoritas dalam Pembahasan Mill

Mill memahami otoritas sebagai cara tertentu untuk mengamankan ketundukan yang bergantung pada penerimaan dari mereka yang tunduk padanya. Mill memandang otoritas sebagai karakteristik tradisi, norma, dan kepercayaan yang berlaku serta orang dan institusi; dan ia menekankan kekuasaan atas karakter manusia dari bentuk otoritas tertentu. Mill memberikan tempat sentral bagi otoritas dalam teorinya tentang politik demokrasi.¹³ Dari ungkapan terkenal dalam *On Liberty* “pertarungan antara Kebebasan dan Otoritas”,¹⁴ Mill menafsirkan bahwa otoritas memiliki hubungan yang kompleks dan saling melengkapi dengan kebebasan. Hubungan antara otoritas dan kebebasan sangat tergantung pada apakah otoritas tersebut dilegitimasi atas dasar tradisional atau modern, dan pada apakah otoritas tersebut dijalankan dalam batas yang tepat.

Dalam artikelnya “The Spirit of The Age”, Mill menyatakan bahwa ketidaksetaraan pengetahuan dan wawasan yang membedakan orang-orang tertentu sebagai otoritas.¹⁵ Dalam studi modern tentang otoritas, kemudian dikenal perbedaan antara otoritas teoretis dan otoritas praktis. Otoritas teoretis (theoretical authority) menunjuk kekuasaan atas dasar keahlian, biasanya di tangan para ahli atau mereka yang dipandang punya pengetahuan lebih tentang suatu perkara dalam bidang pengetahuan atau keahlian tertentu. Contoh otoritas praktis ialah otoritas seorang dokter atas pasien. Sedangkan otoritas praktis (practical authority) menunjuk hak mewajibkan tindakan orang lain disertai sanksi atau, dalam rumusan Joseph Raz, “otoritas dengan kekuasaan untuk menuntut tindakan”. Contoh otoritas praktis adalah otoritas negara atas rakyat.¹⁶ Jika dikaitkan dengan pandangan Mill tentang bagaimana seseorang menjadi otoritas, dapat disimpulkan bahwa pandangan Mill mengandung pemahaman akan otoritas teoretis. Dan bagi Mill, hanya otoritas ini yang sesuai untuk masyarakat modern dan beradab. Maka jika mengacu pada pandangan Mill, otoritas praktis semestinya diberikan kepada mereka yang juga memiliki otoritas teoretis.

Terjadinya otoritas dalam sejarah dipahami Mill dalam dua bentuk, yakni otoritas tradisional dan otoritas modern. Dalam *On Liberty*, Mill membanding-

9 Lihat B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, ...*, 88, 91-92.

10 Lihat George Kateb, “A Reading of *On Liberty*” dalam John Stuart Mill, *On Liberty ...*, 30-31.

11 Henry R. West, “Mill’s Case for Liberty” dalam C. L. Ten (ed.), *Mill’s On Liberty: A Critical Guide*, (New York: Cambridge University Press, 2009), 23.

12 Lihat B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, ...*, 100.

13 Bruce Baum, *Rereading ...*, 83-84.

14 Lihat John Stuart Mill, *On Liberty ...*, 73: “the struggle between Liberty and Authority”

15 Bruce Baum, *Rereading ...*, 86.

16 B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, ...*, 72.

kan antara kesimpulan berdasarkan premis yang diperoleh dari otoritas dengan kesimpulan berdasarkan premis yang diambil dari rasio. Mill memberi contoh para pelajar yang terlibat dalam perdebatan sekolah-sekolah Abad Pertengahan, di mana mereka belajar memahami pendasaran pendapat mereka sendiri dan pendapat yang berlawanan sehingga mereka dapat menegaskan pendapat yang satu dan membantah pendapat yang lain. Bagi Mill, kontes ini memang memiliki cacat yang tidak dapat disembuhkan oleh karena premis yang diajukan diambil dari otoritas, bukan dari rasio. Dan kemudian, menurut Mill, otoritas tradisional memegang kekuasaan di mana aturan yang mengatur perilaku manusia di antara orang-orang tertentu tampak menjadi bagi mereka bukti itu sendiri dan pembedaan itu sendiri (self-evident and self-justifying).¹⁷

Contoh di atas mengantarkan pada pemahaman tentang otoritas modern. Jika otoritas tradisional bersandar pada otoritas itu sendiri, maka otoritas modern bersandar pada sesuatu yang lebih dari sekedar legalitas atau penerimaan hubungan perintah dan kepatuhan antara penguasa dan yang dikuasai. Mill mencirikan otoritas modern sebagai otoritas yang sah berdasarkan hukum dan penerimaan rasional antara penguasa dan yang dikuasai. Legitimasi otoritas politik modern dari persetujuan dan otorisasi rakyat itu ditemukan Mill dalam demokrasi. Otorisasi dari rakyat terwujud dalam pemilihan otoritas dan kontrol atas otoritas. Meskipun ada ancaman tirani mayoritas, bagi Mill bentuk pemerintahan demokrasi modern menjadi yang paling mungkin menjamin kebebasan.¹⁸

Mill berpendapat bahwa otoritas politik sangat diperlukan dalam semua komunitas politik. Namun ia juga mengakui bahwa otoritas politik memiliki karakter ambigu, yakni di satu sisi diperlukan untuk ketertiban dan keamanan dan untuk melindungi anggota komunitas yang lebih lemah, tetapi di sisi lain juga memberi penguasa kekuasaan yang berpotensi represif atas orang lain.¹⁹ Hal ini menjadikan posisi kebebasan dan otoritas selalu berada dalam tegangan.

Tegangan Kebebasan dan Otoritas

Mill mengidentifikasi empat tahap perkembangan sosial di mana masing-masing tahap menggambarkan tegangan yang disebut oleh Mill sebagai pertarungan antara kebebasan dengan otoritas.²⁰ Tahap paling awal adalah pertarungan antara rakyat dan

penguasa yang dipandang (kecuali di beberapa pemerintahan populer Yunani) sebagai posisi yang nis-baya bertentangan dengan orang-orang yang mereka kuasai. Pada tahap ini perjuangan untuk kebebasan adalah dengan membatasi otoritas penguasa. Ada dua cara memperoleh kebebasan itu, yakni

Pertama, dengan mendapatkan pengakuan kebebasan tertentu, yang disebut kebebasan atau hak politik, yang dipandang sebagai suatu kewajiban bagi penguasa untuk tidak dilanggar, dan yang jika dia melanggar, adanya perlawanan khusus atau pemberontakan umum dapat dibenarkan. Yang kedua, dan umumnya merupakan langkah selanjutnya, adalah pembentukan pemeriksaan konstitusional; yang dengannya persetujuan masyarakat, atau badan semacam itu, yang dianggap mewakili kepentingannya, dijadikan syarat yang diperlukan untuk beberapa tindakan yang lebih penting dari kekuasaan pemerintahan.²¹

Dengan membagi kekuasaan pemerintah dan menetapkan satu kelompok penguasa melawan yang lain, masyarakat dibantu untuk menghindari ketidakadilan di tangan para pemimpin politiknya.

Pada tahap kedua kemajuan sosial, tegangan antara kebebasan dan otoritas ditafsirkan oleh Mill sebagai pertarungan antara partai demokratis dan pihak lain – misalnya, pembela aristokrasi atau pendukung monarki – demi tampuk kekuasaan politik. Di sini pemahaman tentang kebebasan tidak saja berarti pembatasan otoritas pemerintah, tetapi adanya pemerintahan sendiri yang dijalankan oleh rakyat secara langsung maupun melalui wakil-wakil sementara yang dapat ditarik kembali sesuai keinginan mayoritas. Pemahaman ini dimaksudkan agar pemerintah mencerminkan kehendak mayoritas, dengan asumsi bahwa rakyat tidak perlu membatasi kekuasaan mereka atas diri mereka sendiri.

Apa yang sekarang diinginkan adalah, bahwa para penguasa harus diidentikkan dengan rakyat; bahwa kepentingan dan kehendak mereka harus menjadi kepentingan dan kehendak rakyat. Rakyat tidak perlu dilindungi dari keinginannya sendiri. Tidak ada rasa takut akan tirani atas dirinya sendiri.²²

21 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 73: "First, by obtaining a recognition of certain immunities, called political liberties or rights, which it was to be regarded as a breach of duty in the ruler to infringe, and which if he did infringe, specific resistance, or general rebellion, was held to be justifiable. A second, and generally a later expedient, was the establishment of constitutional checks; by which the consent of the community, or of a body of some sort, supposed to represent its interests, was made a necessary condition to some of the more important acts of the governing power."

22 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 75: "What was now wanted was, that the rulers should be identified with the people; that their interest and will should be the interest and will of the nation. The nation did not need to be protected against its own will. There was no fear of its tyrannizing over itself."

17 Bruce Baum, *Rereading* ..., 88-89. Lihat juga John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 111, 88.

18 Lihat Bruce Baum, *Rereading* ..., 93-95.

19 Lihat John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 73-74.

20 Untuk uraian lebih lengkap tentang empat tahap perkembangan sosial ini, lihat Jonathan Riley, *The Routledge Guidebook to Mill's On Liberty*, (New York: Routledge, 2015), 53-57.

Maka pada tahap ini tercapai identifikasi rakyat dan penguasa atau pemerintah. Pemerintah memiliki otoritas dari rakyat, dan rakyat memiliki otoritas untuk turut mengendalikan pemerintahan.

Selanjutnya pada tahap ketiga, ketika pemerintahan sudah dikendalikan oleh rakyat, Mill mengakui bahwa tetap ada kebutuhan untuk membatasi otoritas pemerintah. Mill melihat kebutuhan akan kebebasan dalam hal pembatasan otoritas pemerintahan. Bagi Mill,

“pemerintahan sendiri,” dan “kekuasaan rakyat atas diri mereka sendiri,” tidak mengungkapkan keadaan sebenarnya dari kasus tersebut. “Rakyat” yang menjalankan kekuasaan, tidak selalu rakyat yang sama dengan mereka yang menjalankannya; dan “pemerintahan sendiri” yang dibicarakan, bukanlah pemerintahan masing-masing dengan dirinya sendiri, tetapi masing-masing dengan yang lainnya. Kehendak rakyat, apalagi, secara praktis berarti, keinginan sebagian besar atau sebagian paling aktif dari rakyat; mayoritas, atau mereka yang berhasil membuat dirinya diterima sebagai mayoritas: rakyat, akibatnya, mungkin ingin menindas sebagian dari jumlah mereka; dan tindakan pencegahan sangat dibutuhkan terhadap hal ini, seperti terhadap penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan pemerintah atas individu, tidak kehilangan arti pentingnya ketika pemegang kekuasaan secara teratur bertanggung jawab kepada masyarakat, yaitu pihak terkuat di dalamnya.²³

Pada tahap ketiga ini tegangan kebebasan dan otoritas tampak dalam perjuangan bagi pemerintahan demokratis terbatas, di mana para penguasa bertanggung jawab kepada mayoritas namun pada saat yang sama kekuasaan pemerintah yang sah dibatasi oleh pemeriksaan konstitusional dan tuntutan hak-hak politik yang mendasar. Tetapi Mill melihat bahwa pada tahap ini belum ada batasan yang ditempatkan pada otoritas opini populer untuk menegakkan standar perilakunya.

23 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 75-76: “self-government,” and “the power of the people over themselves,” do not express the true state of the case. The “people” who exercise the power, are not always the same people with those over whom it is exercised; and the “self-government” spoken of, is not the government of each by himself, but of each by all the rest. The will of the people, moreover, practically means, the will of the most numerous or the most active part of the people; the majority, or those who succeed in making themselves accepted as the majority: the people, consequently, may desire to oppress a part of their number; and precautions are as much needed against this, as against any other abuse of power. The limitation, therefore, of the power of government over individuals, loses none of its importance when the holders of power are regularly accountable to the community, that is, to the strongest party therein.”

Pada tahap keempat perkembangan sosial, dalam pandangan Mill, mayoritas rakyat telah memerlukan kekuasaan untuk memastikan, dengan cara selain sanksi hukum, bahwa semua sesuai dengan pendapat dan kebiasaan. Maka pada tahap ini perjuangan untuk kebebasan mengambil dimensi baru, yakni bahwa individu membutuhkan perlindungan tidak hanya dari otoritas pemerintah tetapi juga dari pendapat populer yang semakin menindas karena dapat mencapai tujuan campur tangannya tanpa bergantung sama sekali pada undang-undang atau aturan pemerintah lainnya.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap tirani hakim tidaklah cukup: perlu juga perlindungan terhadap tirani opini dan perasaan yang berlaku; melawan kecenderungan masyarakat untuk memaksakan, dengan cara lain selain hukuman sipil, gagasan dan praktiknya sendiri sebagai aturan perilaku bagi mereka yang tidak setuju dengannya; untuk membelenggu perkembangan, dan, jika mungkin, mencegah pembentukan, individualitas apa pun yang tidak selaras dengan caranya, dan memaksa semua karakter untuk membentuk diri mereka berdasarkan modelnya sendiri. Ada batas untuk campur tangan pendapat kolektif yang sah dengan kemerdekaan individu: dan untuk menemukan batas itu, dan mempertahankannya dari perambahan, sangat diperlukan untuk kondisi yang baik dari urusan manusia, sebagai perlindungan terhadap despotisme politik.²⁴

Mill mengakui bahwa kebanyakan orang sekarang akan menerima proposisi umum bahwa ada beberapa batasan untuk paksaan yang sah – baik dalam bentuk sanksi hukum atau stigma sosial.

Dari penelusuran akan tahap-tahap perkembangan sosial itu, Mill melihat ada yang masih harus diselesaikan, yakni di mana menempatkan batas, atau bagaimana membuat penyesuaian yang tepat, antara kemerdekaan individu dan kontrol sosial. Mill kemudian menyadari ketiadaan prinsip umum yang menjawab pertanyaan di atas.²⁵

24 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 76: “Protection, therefore, against the tyranny of the magistrate is not enough: there needs protection also against the tyranny of the prevailing opinion and feeling; against the tendency of society to impose, by other means than civil penalties, its own ideas and practices as rules of conduct on those who dissent from them; to fetter the development, and, if possible, prevent the formation, of any individuality not in harmony with its ways, and compel all characters to fashion themselves upon the model of its own. There is a limit to the legitimate interference of collective opinion with individual independence: and to find that limit, and maintain it against encroachment, is as indispensable to a good condition of human affairs, as protection against political despotism.”

25 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 77.]

Prinsip Cedera

Tegangan antara kebebasan dan otoritas yang ditelusuri oleh Mill di atas menjadikan hubungan antara kebebasan individu dan otoritas negara membentuk suatu dinamika pertarungan. Agar dinamika pertarungan tersebut tetap sehat dan seimbang, Mill melihat perlunya prinsip yang mengatur hubungan keduanya. Di sini Mill menempatkan diri sebagai pembela kebebasan, dan melihat bahwa otoritas negara tidak patut memberangus kebebasan individu atau warga. Namun Mill juga yakin bahwa orang akan menyalahgunakan kebebasannya untuk menindas orang lain bila kebebasannya tidak dibatasi. Menurut Mill,

*semua hal yang membuat hidup berharga bagi siapa pun bergantung pada penegakan kekangan terhadap tindakan yang dilakukan orang lain. Oleh karena itu, beberapa aturan perilaku harus diberlakukan, pertama-tama oleh undang-undang, dan oleh opini tentang banyak hal yang tidak sesuai dengan subjek untuk bekerjanya hukum.*²⁶

Maksudnya adalah bahwa otoritas negara dapat dan berhak membatasi kebebasan warga jika, dan hanya jika, tindakan warga mengancam kebebasan warga lain. Itu berarti, kebebasan hanya bisa dibatasi demi kebebasan, bukan demi tujuan lain. Itu juga berarti, pelanggaran kebebasan warga terjadi bila penggunaan kekuasaan negara dan/atau pelaksanaan kebebasan warga lain mengakibatkan cedera (harm) pada kebebasan warga tertentu. Inilah yang disebut prinsip cedera (harm principle).²⁷ Secara lengkap, gagasan utama prinsip cedera Mill tertuang sebagai tujuan esai On Liberty yakni bahwa,

Tujuan Esai ini adalah untuk menegaskan satu prinsip yang sangat sederhana, sebagai yang berhak mengatur secara mutlak hubungan masyarakat dengan individu melalui paksaan dan kontrol, baik cara yang digunakan berupa kekuatan fisik dalam bentuk hukuman legal, atau pemaksaan moral opini publik. Prinsip itu adalah, bahwa satu-satunya tujuan umat manusia dijamin, secara individu atau kolektif, dalam mencampuri kebebasan bertindak dari siapa pun anggotanya, adalah perlindungan diri. Bahwa satu-satunya tujuan kekuasaan dapat dilaksanakan secara sah atas setiap anggota masyarakat yang beradab, bertentangan dengan keinginannya, adalah untuk mencegah cedera pada orang lain.²⁸

26 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 76 "All that makes existence valuable to any one, depends on the enforcement of restraints upon the actions of other people. Some rules of conduct, therefore, must be imposed, by law in the first place, and by opinion on many things which are not fit subjects for the operation of law."

27 Lihat B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan*, ..., 102.

28 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 80-81 "The object of this Essay is to assert one very simple principle, as entitled to govern absolutely the dealings of society with the individual in the way of compulsion and control, whether the means used

Prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip cedera (harm principle), atau prinsip cedera-pada-orang lain (harm-to-others principle). Prinsip ini menyatakan bahwa campur tangan (interferences) terhadap kebebasan individu dapat dibenarkan hanya untuk mencegahnya dari mencederai orang lain dan tidak pernah hanya untuk kebaikannya sendiri. Dia tidak berhak dipaksa untuk melakukan atau menahan karena akan lebih baik baginya untuk melakukannya, karena itu akan membuatnya lebih bahagia, karena, menurut pendapat orang lain, melakukannya adalah bijaksana, atau bahkan benar. Ini adalah alasan yang baik untuk memprotesnya, atau berdebat dengannya, atau membujuknya, atau memohon padanya, tetapi bukan untuk memaksanya, atau mengunjungnya dengan kejahatan apapun jika dia melakukan sebaliknya. Untuk membenarkan itu, perilaku yang diinginkan untuk menghalangi dia, harus diperhitungkan untuk menghasilkan kejahatan kepada orang lain. Yang tersirat di sini adalah pandangan bahwa semua paksaan sosial harus dibenarkan, dan bahwa campur tangan semacam itu hanya dapat dibenarkan jika hal itu mencegah seseorang untuk membahayakan orang lain. Akibatnya, setiap individu diberi kebebasan untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Mill berasumsi bahwa kebebasan ini akan membawa pada perkembangan penuh setiap individu. Maka Owen Fiss menegaskan bahwa prinsip cedera ini adalah tema menyeluruh dan kontribusi yang paling khas dari On Liberty.²⁹

Cedera sebagai Prinsip

Mill secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya alasan untuk campur tangan atas kebebasan individu adalah untuk mencegah cedera pada orang lain (prevent harm to others) tanpa langsung memberi defenisi pada cedera yang dimaksud. Mill juga tidak memberikan ketentuan umum yang eksplisit. Menurut D.G. Brown, Mill tampaknya berpikir bahwa tidak ada penjelasan lebih lanjut yang diperlukan, dan mengandalkan penutur bahasa Inggris yang terpelajar untuk menerima penerapan kata tersebut.³⁰

be physical force in the form of legal penalties, or the moral coercion of public opinion. That principle is, that the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their number, is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others."

29 Owen Fiss, "A Freedom Both Personal and Political" dalam John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 179.

30 D.G. Brown, "The Harm Principle" dalam Christopher Macleod dan Dale E. Miller (ed.), *A companion to Mill: Blackwell companions to philosophy*, (Hoboken: Wiley Blackwell, 2016), 411.

Mill memang tidak memberi penjelasan sejelas mungkin tentang arti cedera, dan menurut Riley hal ini telah menyebabkan kebingungan dan kontroversi. Namun Mill menunjuk cedera sebagai tidak termasuk ketidak sukuaan, atau luka subjektif tanpa cedera yang terlihat. Jika individu memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang dia suka dalam urusannya sendiri, maka harus dijamin sebagai hak bahwa kesukaannya tidak akan dikalahkan oleh kesukaan dan ketidak sukuaan orang lain yang berlawanan sehubungan dengan urusan yang menyangkut diri sendiri. Dan dengan cara yang sama, perilaku yang menyangkut diri sendiri tidak dapat direduksi menjadi perilaku yang tidak dipedulikan orang lain atau yang disukai orang lain. Dengan kata lain, fakta bahwa seseorang tidak menyukai tindakan tertentu tidak berarti bahwa dia dicerderai oleh tindakan itu.³¹

Riley melihat gagasan tentang cedera yang paling cocok dengan On Liberty adalah gagasan deskriptif yang luas tentang “luka yang kelihatan” (perceptible hurt). Sebagaimana ditulis oleh Mill bahwa,

*Tetapi sehubungan dengan yang semata kontingen, atau, sebagaimana dapat disebut, kerugian konstruktif yang ditimbulkan oleh seseorang terhadap masyarakat, dengan perilaku yang tidak melanggar kewajiban khusus apa pun kepada publik, atau kesempatan menimbulkan luka yang kelihatan bagi individu mana pun kecuali dirinya sendiri; ketidaknyamanan adalah sesuatu yang dapat ditanggung oleh masyarakat, demi kebaikan yang lebih besar dari kebebasan manusia.*³²

Mill percaya ada tindakan yang benar-benar menyangkut diri sendiri, “tepat” melampaui moralitas, yang tidak memengaruhi orang lain dalam arti mencederai kepentingan mereka, atau melakukannya hanya dengan persetujuan dan partisipasi tulus mereka. Tindakan seperti itu, diakuinya, dapat dan seharusnya memengaruhi perasaan orang lain. Orang lain mungkin merasa sangat tidak suka, misalnya, dan dengan demikian berusaha menghindari agen tersebut. Tetapi ketidak sukuaan belaka tidak berarti cedera, dan hukuman alami yang timbul dari ketidak sukuaan tidak sama dengan cedera non-konsensual bagi siapa pun. Karena tindakan yang menyangkut diri sendiri mungkin tidak disukai oleh orang lain yang kepentingannya tidak dicerderai, Mill mengecualikan ketidak sukuaan belaka dari ga-

gasannya tentang cedera. Cedera adalah sesuatu selain ketidak sukuaan belaka, yaitu, “kerusakan yang kelihatan” (perceptible damage). Ini mungkin muncul dalam berbagai bentuk, termasuk cedera fisik (tidak kecuali kematian), kurungan paksa, kerugian finansial, rusaknya reputasi, ingkar janji (kontrak atau lainnya) dan sebagainya. Tindakan yang menyangkut diri sendiri tidak secara langsung menyebabkan segala bentuk kerusakan yang terlihat pada orang lain, atau, jika terjadi, hanya dengan persetujuan dan partisipasi tulus mereka. Sebaliknya, perilaku yang menyangkut orang lain secara langsung menyebabkan kerusakan pada kepentingan orang lain tanpa persetujuan dan partisipasi tulus mereka, atau membawa kemungkinan yang masuk akal untuk itu. Gagasan tentang cedera dalam argumen On Liberty adalah gagasan sederhana tentang kerusakan yang kelihatan.³³

Riley menggarisbawahi gagasan tentang cedera sebagai luka yang kelihatan atau kerusakan yang kelihatan. Luka yang kelihatan adalah kerusakan pada objek eksternal yang pada prinsipnya dapat dikenali secara langsung oleh pengamat kompeten yang berada pada posisi yang sesuai. Luka yang kelihatan pada kepentingan individu, bagi Mill tampaknya berarti kerusakan dalam hal eksternal apapun yang membuat individu tersebut kuatir, termasuk tubuhnya, mobilitas, tempat tinggal, keuangan, kontrak, reputasi, persahabatan, jenis hubungan lainnya, dan seterusnya, karena perubahan yang kelihatan pada objek-objek itu mengubah keadaan pribadinya dan dengan demikian memengaruhi kemampuannya untuk membuat pilihannya sendiri dan mengembangkan kemampuannya yang lebih tinggi.³⁴

Herry-Priyono menganalisis bahwa secara sederhana dapat dikatakan cedera menunjuk tidak terwujudnya kepentingan (interest) akibat pemaksaan yang dilakukan oleh orang lain atau otoritas negara. Individu boleh bertindaklah sesuka hatinya, sejauh tindakannya itu tidak mencederai kebebasan orang lain. Jika probabilitas pencideraan muncul, tindakan itu boleh dilarang. Istilah ‘kepentingan’ (interest) sendiri, dalam catatan Herry-Priyono, masih menimbulkan perdebatan hingga hari ini. Apa yang dimaksud Mill sebagai kepentingan yang tidak boleh dicerderai baik oleh negara maupun warga lain menunjuk hak-hak dasar/ asasi (basic rights). Dalam buku On Liberty, hak-hak dasar dicontohkan dengan hak/kebebasan berpikir, berpendapat, berkumpul, memilih, mengejar perkembangan pribadi, dan sebagainya. Hak-hak dasar ini terungkap dalam dokumen HAM. Adanya tata negara

31 Jonathan Riley, *The Routledge ...*, 189-190.

32 John Stuart Mill, *On Liberty ...*, 145. “*But with regard to the merely contingent, or, as it may be called, constructive injury which a person causes to society, by conduct which neither violates any specific duty to the public, nor occasions perceptible hurt to any assignable individual except himself; the inconvenience is one which society can afford to bear, for the sake of the greater good of human freedom.*”

33 Jonathan Riley, *The Routledge ...*, 125-126.

34 Jonathan Riley, *The Routledge ...*, 190-191.

bukan untuk meniadakan atau mengatasi hak-hak dasar sebagai kepentingan warga, melainkan untuk menjamin perwujudannya. Bila disederhanakan, dapat dikatakan bahwa intervensi otoritas negara atau warga lain tidak dibenarkan terhadap kebebasan ranah pribadi (private sphere) yang biasanya terkait dengan idiom kebebasan negatif. Intervensi otoritas negara dibenarkan pada ranah tindakan yang menyangkut tertib publik tatanan hidup bersama (public sphere). Diakui bahwa perbedaan ini terlalu sederhana jika dibandingkan dengan kenyataan aktual, namun dapat menjadi prinsip dasar yang dipegang dalam dinamika hubungan kebebasan individu dan otoritas negara.³⁵

Penerapan Prinsip Cedera dalam Membatasi Kebebasan dan Otoritas

Dalam penerapan prinsip cederanya, Mill sejak awal menegaskan prinsipnya hanya berlaku bagi orang yang sudah dianggap dewasa dan di tengah masyarakat yang sudah maju dalam peradaban. Ia menegaskan dalam paragraf sesudah doktrinnya sebagai berikut.

Mungkin hampir tidak perlu dikatakan bahwa doktrin ini dimaksudkan untuk diterapkan hanya pada manusia dalam kematangan kemampuan mereka. Kami tidak berbicara tentang anak-anak, atau orang muda di bawah usia yang dapat ditetapkan hukum sebagai pria atau wanita. Mereka yang masih dalam keadaan membutuhkan perawatan oleh orang lain, harus dilindungi dari tindakan mereka sendiri maupun dari cedera eksternal. Untuk alasan yang sama, kita dapat mengesampingkan keadaan masyarakat terbelakang di mana ras itu sendiri dapat dianggap sebagai tidak berperadaban.³⁶

Batasan ini penting untuk Mill memberi pengecualian bagi beberapa bentuk paternalisme lemah untuk orang yang belum dewasa dan despotisme untuk masyarakat yang belum maju. Di luar pengecualian batasan di atas, Mill menjadikan cedera sebagai prinsip yang membatasi kebebasan individu sekaligus mengijinkan campur tangan otoritas atas kebebasan tersebut.

Prinsip cedera Mill memuat beberapa hal yang menurut Brink patut dicermati. Pertama, Mill memperhatikan artikulasi prinsip-prinsip untuk diterapkan pada pembatasan kebebasan dalam berbagai konteks, yang melibatkan berbagai aktor potensial dan berbagai bentuk pembatasan. Mill mungkin paling memperhatikan kasus-kasus di mana negara menggunakan hukum perdata atau pidana untuk melarang perilaku dan menerapkan sanksi untuk ketidakpatuhan. Dapat dikatakan bahwa kasus utama yang menjadi perhatiannya adalah larangan secara legal oleh negara. Tetapi ia juga memperhatikan kasus-kasus lain, termasuk kasus-kasus di mana kelompok sosial menggunakan ancaman kutukan dan pengucilan untuk membatasi kebebasan dan memastikan kesesuaian dan kasus-kasus di mana satu individu membatasi kebebasan orang lain. Kedua, Brink melihat Mill membedakan pembatasan kebebasan paternalistik dan moralistik dari pembatasan kebebasan berdasarkan prinsip cedera. Pembatasan kebebasan B oleh A bersifat paternalistik jika dilakukan untuk keuntungan B sendiri. Pembatasan kebebasan B oleh A bersifat moralistik jika dilakukan untuk memastikan bahwa B bertindak secara moral atau tidak secara moral. Pembatasan kebebasan B oleh A adalah penerapan prinsip cedera jika dilakukan untuk mencegah cedera pada orang lain selain B. Dengan demikian Mill dengan jelas mengatakan hanya pencegahan cedera pada orang lain yang menjadi syarat agar pembatasan kebebasan dapat diizinkan.³⁷ Mill menulis,

*Kepentingan-kepentingan itu, menurut saya, mengizinkan penundukan spontanitas individu pada kontrol eksternal, hanya sehubungan dengan tindakan masing-masing, yang menyangkut kepentingan orang lain. Jika seseorang melakukan tindakan yang menyakiti orang lain, ada kasus prima facie untuk menghukumnya, dengan hukum, atau, jika hukuman legal tidak dapat diterapkan dengan aman, dengan ketidaksetujuan umum.*³⁸

Untuk melihat secara lebih rinci, Brink membantu mengidentifikasi pendekatan kategoris dari prinsip cedera Mill.³⁹ Pertama, Mill membedakan antara cedera (harm) dan pelanggaran (offense) semata. Tidak setiap konsekuensi yang tidak diinginkan bagi orang lain dianggap sebagai cedera. Pelanggaran cenderung relatif kecil dan berlangsung sebentar saja. Untuk meminimalkan cedera, suatu tindakan mestinya melukai atau

35 Lihat B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, ...*, 102.

36 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 81. "It is, perhaps, hardly necessary to say that this doctrine is meant to apply only to human beings in the maturity of their faculties. We are not speaking of children, or of young persons below the age which the law may fix as that of manhood or womanhood. Those who are still in a state to require being taken care of by others, must be protected against their own actions as well as against external injury. For the same reason, we may leave out of consideration those backward states of society in which the race itself may be considered as in its nonage."

37 David O. Brink, *Mill's Progressive Principles*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), 136-137.

38 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 81: "Those interests, I contend, authorise the subjection of individual spontaneity to external control, only in respect of those actions of each, which concern the interest of other people. If any one does an act hurtful to others, there is a prima facie case for punishing him, by law, or, where legal penalties are not safely applicable, by general disapprobation."

39 Lihat David O. Brink, *Mill's Progressive* ..., 173-175 dan 196-198.

memundurkan kepentingan penting orang tertentu, kepentingan di mana mereka memiliki hak. Mill menolak peraturan tentang pelanggaran belaka, dan prinsip cedera tampaknya menjadi satu-satunya pembenaran yang dia akui untuk membatasi kebebasan. Perilaku yang benar-benar menimbulkan cedera dapat diatur, sedangkan perilaku ofensif semata tidak bisa diatur.

Perbuatan seseorang dapat menyakiti orang lain, atau mengurangi kesejahteraan mereka dengan pertimbangan yang semestinya, tanpa melanggar hak-hak mereka yang telah ditetapkan. Pelanggar kemudian dapat dihukum secara adil berdasarkan pendapat, meskipun tidak oleh hukum.⁴⁰

Kedua, Mill berpandangan bahwa prinsip cedera merupakan sesuatu yang dapat diterapkan secara prospektif untuk mencegah seseorang bertindak dengan cara tertentu dan menyebabkan cedera. Otoritas dapat dibenarkan untuk membatasi kebebasan hanya dalam kasus di mana agen akan bertindak untuk menyebabkan cedera. Meskipun tidak memberi informasi memadai karena dalam banyak kasus tindakan tertentu berisiko mencederaikan, namun Mill menegaskan,

Kapan pun, singkatnya, ada kerusakan yang pasti, atau risiko kerusakan yang pasti, baik pada individu atau publik, kasus tersebut dikeluarkan dari wilayah kebebasan, dan ditempatkan pada moralitas atau hukum.⁴¹

Di sini Mill mengklaim jika tindakan tersebut menimbulkan risiko besar cedera yang akan segera terjadi, itu sudah cukup untuk tujuan prinsip cedera.

Ketiga, Mill menginginkan prinsip cedera memiliki cakupan yang luas. Dia menegaskan bahwa prinsip cedera mengatur lebih dari hubungan antara pemerintah dan individu. Penerapannya harus mencakup keluarga, khususnya hubungan antara suami dan istri serta orang tua dan anak.⁴² Dan Keempat,

meskipun Mill sering hanya berfokus pada cedera, fokus utamanya adalah pada cedera non-konsensual.

Tetapi ada bidang tindakan di mana masyarakat, yang dibedakan dari individu, jika ada, hanya memiliki kepentingan tidak langsung; memahami semua bagian dari kehidupan dan perilaku seseorang yang hanya mempengaruhi dirinya sendiri, atau jika itu juga mempengaruhi orang lain, hanya dengan persetujuan dan partisipasi mereka yang bebas, sukarela, dan tidak tertipu.⁴³

Dari empat kategori di atas, Mill dengan jelas menyatakan bahwa cedera adalah satu-satunya dasar yang sah untuk membatasi kebebasan, yang berarti menurutnya hal itu menyatakan syarat yang diperlukan untuk membatasi kebebasan.

Dengan menjadikan cedera sebagai satu-satunya prinsip yang membatasi kebebasan, Mill memberi pendasaran tentang persoalan kecukupan prinsipnya. Mill menyarankan bahwa menyebabkan cedera bagi orang lain sudah cukup untuk membuat suatu perilaku memenuhi syarat untuk diatur berdasarkan prinsip cedera.⁴⁴

Segara setelah bagian mana pun dari perilaku seseorang memengaruhi kepentingan orang lain secara merugikan, masyarakat memiliki yurisdiksi atasnya, dan pertanyaan apakah kesejahteraan umum akan atau tidak akan dipromosikan dengan mengganggunya, menjadi terbuka untuk diskusi. Tetapi tidak ada ruang untuk menjawab pertanyaan seperti itu ketika perilaku seseorang tidak mempengaruhi kepentingan orang lain selain dirinya sendiri, atau kebutuhan tidak mempengaruhi mereka kecuali mereka suka (semua orang yang bersangkutan sudah cukup umur, dan tingkat pemahaman yang umum). Dalam semua kasus tersebut harus ada kebebasan yang sempurna, legal dan sosial, untuk melakukan tindakan dan menanggung konsekuensinya.⁴⁵

40 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 139. "The acts of an individual may be hurtful to others, or wanting in due consideration for their welfare, without going the length of violating any of their constituted rights. The offender may then be justly punished by opinion, though not by law."

41 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 145. "Whenever, in short, there is a definite damage, or a definite risk of damage, either to an individual or to the public, the case is taken out of the province of liberty, and placed in that of morality or law."

42 Lihat John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 165-166. Di sini Mill memperhatikan bahwa "negara, sementara menghormati kebebasan masing-masing dalam apa yang secara khusus menyangkut dirinya sendiri, terikat untuk mempertahankan kontrol yang waspada atas pelaksanaan kekuasaan yang memungkinkan dimiliki atas orang lain. Kewajiban ini hampir seluruhnya diabaikan dalam hal hubungan keluarga, suatu hal, yang pengaruh langsungnya terhadap kebahagiaan manusia, lebih penting daripada semua hal lain jika digabungkan."

43 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 82. "But there is a sphere of action in which society, as distinguished from the individual, has, if any, only an indirect interest; comprehending all that portion of a person's life and conduct which affects only himself, or if it also affects others, only with their free, voluntary, and undeceived consent and participation."

44 Lihat David O. Brink, *Mill's Progressive* ..., 176-180.

45 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 139. "As soon as any part of a person's conduct affects prejudicially the interests of others, society has jurisdiction over it, and the question whether the general welfare will or will not be promoted by interfering with it, becomes open to discussion. But there is no room for entertaining any such question when a person's conduct affects the interests of no persons besides himself, or needs not affect them unless they like (all the persons concerned being of full age, and the ordinary amount of understanding). In all such cases there should be perfect freedom, legal and social, to do the action and stand the consequences."

Dari kutipan di atas tersirat pembedaan Mill tentang perilaku individu, yakni ketika perilaku seseorang tidak mempengaruhi orang lain, dan ketika mempengaruhi orang lain. Dengan demikian dapat dibedakan antara perilaku yang menyangkut diri sendiri (self-regarding conduct) dan perilaku yang menyangkut orang lain (other-regarding conduct).

Pembatasan bagi kebebasan yang sesuai dengan prinsip cedera hanya pada perilaku yang menyangkut orang lain. Ada dua maksim yang dipertahankan Mill dalam setiap aplikasi dari prinsip cedera-nya. Mill menulis itu pada awal bagian aplikasi dari buku *On Liberty*.

Maksim-maksim itu adalah, pertama, individu tidak bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakannya, sejauh ini tidak menyangkut kepentingan orang lain kecuali dirinya sendiri. Nasihat, instruksi, bujukan, dan penghindaran oleh orang lain jika dianggap perlu oleh mereka untuk kebaikan mereka sendiri, adalah satu-satunya ukuran yang dapat dibenarkan oleh masyarakat untuk mengungkapkan ketidak sukuaan atau ketidaksetujuannya terhadap perilakunya. Kedua, untuk tindakan yang merugikan kepentingan orang lain, individu bertanggung jawab, dan dapat dikenakan hukuman sosial atau hukuman legal, jika masyarakat berpendapat bahwa salah satu atau yang lain diperlukan untuk perlindungannya.⁴⁶

Kedua maksim ini memperluas pemahaman mengenai prinsip cedera. Maksim pertama yang dapat disebut sebagai maksim kebebasan menyatakan bahwa masyarakat seharusnya tidak kuatir untuk mencegah cedera pada orang lain yang bersifat konsensual. Maksim kedua yang dapat disebut sebagai maksim otoritas sosial menyatakan bahwa masyarakat harus mempertimbangkan paksaan untuk mencegah cedera pada orang lain yang bersifat non-konsensual. Meskipun pertimbangan paksaan adalah sah, bagaimanapun, masyarakat dapat memutuskan dengan tepat untuk tidak menegakkan aturan moral atau hukum karena utilitas dalam arti terbesar merekomendasikan penegakannya.

46 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 156. "The maxims are, first, that the individual is not accountable to society for his actions, in so far as these concern the interests of no person but himself. Advice, instruction, persuasion, and avoidance by other people if thought necessary by them for their own good, are the only measures by which society can justifiably express its dislike or disapprobation of his conduct. Secondly, that for such actions as are prejudicial to the interests of others, the individual is accountable, and may be subjected either to social or to legal punishments, if society is of opinion that the one or the other is requisite for its protection."

Tujuan Utilitarian dalam Prinsip Cedera Mill

Analisis utilitarianisme tidak dapat dihindari dalam menemukan tujuan dari penerapan prinsip cedera Mill. Mill sendiri ialah pemikir mazhab utilitarian. Utilitarianisme adalah bagian rumpun etika eudaimonisme, paham etika yang melihat bahwa apa yang baik dan benar adalah yang mendatangkan kebahagiaan (happiness). Etika utilitarian mematok indikator kebahagiaan pada terjadinya manfaat (Inggris: utility; Latin: utilitas - manfaat, utilis - bermanfaat).⁴⁷ Dalam *On Liberty*, Mill menulis sebagai berikut.

Adalah tepat untuk menyatakan saya melepaskan keuntungan apa pun yang dapat diperoleh dari argumen saya dari gagasan hak abstrak, sebagai sesuatu yang terlepas dari utilitas. Saya menganggap utilitas sebagai daya tarik utama pada semua pertanyaan etis; tetapi itu harus utilitas dalam arti terbesar, didasarkan pada kepentingan permanen manusia sebagai makhluk progresif.⁴⁸

Argumen Mill sebagai seorang utilitarian muncul dalam pendasarannya atas prinsip cedera di atas, yakni pada batas umum pada paksaan yang sah. Batas itu pada akhirnya dibenarkan oleh utilitas umum. Dalam analisis Riley, utilitas umum yang dipahami dengan demikian memberi otoritas kepada masyarakat untuk mempertimbangkan campurtangan koersif terhadap tindakan yang menimbulkan cedera bagi orang lain, meskipun masyarakat dapat memutuskan dengan tepat setelah mempertimbangkan untuk tidak ikut campur karena kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya. Kepentingan permanen manusia dalam "perlindungan diri" atau "keamanan" memberi otoritas kepada masyarakat untuk menetapkan aturan moral dan hukum yang mendistribusikan dan memberikan sanksi kewajiban yang sama untuk tidak menimbulkan cedera pada orang lain. Utilitas umum dalam arti terbesar juga mengesampingkan kontrol sosial sama sekali atas tindakan yang tidak menimbulkan cedera pada orang lain, bahkan jika orang lain yang bersangkutan sangat tidak menyukai perilaku itu. Lebih khusus lagi, kepentingan permanen manusia dalam "pengembangan diri" atau "individualitas" mengizinkan sesuai haknya perlindungan mutlak atas kebebasan individu sehubungan dengan tindakan tersebut.⁴⁹

47 Lihat B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, ...*, 101-102.

48 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 81. "It is proper to state that I forego any advantage which could be derived to my argument from the idea of abstract right, as a thing independent of utility. I regard utility as the ultimate appeal on all ethical questions; but it must be utility in the largest sense, grounded on the permanent interests of man as a progressive being."

49 Jonathan Riley, *The Routledge ...*, 62-63.

Kriteria manfaat juga dirujuk antara lain dalam membatasi kebebasan berpendapat. Untuk penjelasan ini, Herry-Priyono mengutip contoh terkenal dari Mill.

*"Pandangan bahwa pedagang jagung ialah penyebab kelaparan kaum miskin, atau pendapat bahwa hak milik pribadi adalah perampokan, tidak boleh dilarang sejauh hanya diedarkan melalui media. Tetapi, pandangan itu boleh ditindak atas dasar keadilan ketika di-orasikan di depan massa beringas yang berkumpul di depan rumah pedagang jagung, atau bila diedarkan di antara massa beringas dalam bentuk poster."*⁵⁰

Prinsip cedera dalam perwujudan dan pembatasan kebebasan warga tampak jelas dalam posisi itu. Apa yang mencederai kebebasan warga lain tentu bertentangan dengan asas manfaat yang menjadi isi konsep kebahagiaan/kemaslahatan bersama. Maka, bagi Mill, asalkan tidak mencederai orang lain, kebebasan warga (political liberty) merupakan syarat niscaya bagi pencapaian kebahagiaan.⁵¹

Kesimpulan

Dalam *On Liberty*, Mill menyatakan perjalanan sejarah manusia dicirikan oleh pertarungan antara kebebasan (liberty) dan otoritas (authority). Pertarungan antara kebebasan dan otoritas adalah potret paling menonjol dalam sejarah. Pertarungan itu berjalan terus seiring perkembangan masyarakat. Kehidupan politik berjalan dalam tegangan antara kebebasan dan otoritas.

Kebebasan yang dibahas Mill dalam *On Liberty* adalah kebebasan warga atau sipil (civil liberty) atau kebebasan sosial (social liberty). Kebebasan bagi Mill berarti tidak adanya campur tangan. Dalam perjalanan sejarah, Mill melihat kebebasan selalu berada dalam tegangan dengan otoritas. Otoritas dalam pemikiran Mill merupakan bentuk kekuasaan yang legitim. Legitimasi otoritas diperoleh dari keunggulan rasional dan penerimaan atasnya. Keunggulan rasional menjadikan seseorang memiliki otoritas atau menjadi otoritas. Penerimaan atas otoritas membentuk otoritas tradisional dan otoritas modern. Otoritas tradisional terbentuk dan diterima atas dasar otoritas itu sendiri dan otoritas

modern atas dasar rasional. Mill menyoroti apakah otoritas dijalankan dalam batas yang tepat, sebab otoritas yang melampaui batas menjadi ancaman bagi kebebasan.

Untuk menganalisis tegangan antara kebebasan dan negara dalam kehidupan politik sehingga kehidupan politik tidak jatuh dalam salah satu kutub atau salah satu ekstrem, Mill menegaskan prinsipnya yang dikenal sebagai prinsip cedera (harm principle) atau prinsip cedera pada orang lain (harm-to-others principle). Prinsip itu menegaskan bahwa satu-satunya tujuan umat manusia dijamin, secara individu atau kolektif, dalam mencampuri kebebasan bertindak dari siapa pun anggotanya, adalah perlindungan diri. Bahwa satu-satunya tujuan kekuasaan dapat dilaksanakan secara sah atas setiap anggota masyarakat yang beradab, bertentangan dengan keinginannya, adalah untuk mencegah cedera pada orang lain. Dan satu-satunya bagian dari perilaku seseorang, yang dia setuju oleh masyarakat, adalah yang menyangkut orang lain, sementara itu dalam bagian yang hanya menyangkut dirinya sendiri, terdapat independensi absolut. Individu berdaulat atas dirinya sendiri, atas tubuh dan pikirannya sendiri. Mill tidak mendefinisikan tentang cedera yang dimaksud, namun beberapa konsep seperti luka atau kerusakan yang kelihatan dan tidak terwujudnya kepentingan seorang individu akibat tindakan individu lain dapat menjelaskan maksudnya. Bagi Mill, prinsip cedera berlaku hanya bagi orang yang sudah dianggap dewasa dan di tengah masyarakat yang sudah maju dalam peradaban.

Teori kebebasan Mill dan prinsip cederanya mengandung nilai utilitarianisme, yakni manfaat dalam arti terbesar. Dalam situasi penindasan oleh otoritas, individu tidak akan dapat mencapai tujuan sejati hidupnya. Hanya dalam situasi kebebasan, individu mendapat jaminan akan pencarian kebenaran dan kebahagiaan. Asalkan tidak mencederai orang lain, kebebasan merupakan syarat niscaya bagi pencapaian kebahagiaan.

50 John Stuart Mill, *On Liberty* ..., 121. "An opinion that corn-dealers are starvers of the poor, or that private property is robbery, ought to be unmolested when simply circulated through the press, but may justly incur punishment when delivered orally to an excited mob assembled before the house of a corn-dealer, or when handed about among the same mob in the form of a placard."

51 B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, ...*, 104.

Daftar Pustaka

Mill, John Stuart, 2003 [1859], *On Liberty* (diedit oleh David Bromwich dan George Kateb), New Haven and London: Yale University Press.

Mill, John Stuart, 1981 [1873], *Autobiography*, dalam John M. Robson dan Jack Stillinger (ed.), *Autobiography and Literary Essays* by John Stuart Mill, Volume I, London: Routledge & Kegan Paul.

Pustaka Sekunder

Baum, Bruce, 2000, *Rereading Power and Freedom in J.S. Mill*, Toronto Buffalo and London: University of Toronto Press Incorporated.

Brink, David O., 2013, *Mill's Progressive Principles*, Oxford: Oxford University Press.

Capaldi, Nicholas, 2004, *John Stuart Mill: A Biography*, New York: Cambridge University Press.

Craig, Edward, (ed.), 2005, *The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy*, London and New York: Routledge.

Herry-Priyono, B., 2022, *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Macleod, Christopher dan Dale E. Miller (ed.), 2017, *A Companion to Mill: Blackwell companions to philosophy*, Hoboken: Wiley Blackwell.

Riley, Jonathan, 2015, *The Routledge Guidebook to Mill's On Liberty*, London and New York: Routledge.

Ten, C. L.(ed.), 2009, *Mill's On Liberty: A Critical Guide*, New York: Cambridge University Press.